

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan aspek penting dalam perekonomian disuatu negara. Keberadaan bank di Indonesia sudah berdiri sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda.¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito, kemudiann menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum dan bank perekonomian rakyat dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana serta penunjang pembangunan nasional untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.²

Bank sebagai lembaga keuangann menawarkan jasa penyimpanan dana, menyalurkan dana, dan pengkreditan maka kepada semua kalangan masyarakat, dari itu di Indonesia bank dibedakan jenisnya berdasarkan peran dan kegiatan operasionalnya. terdapat berbagai jenis bank yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian, yaitu Bank Sentral yang berfungsi mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Pemerintah yang modal dan kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah seperti BRI dan BNI, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melayani usaha mikro dan kecil dengan layanan yang lebih sederhana, Bank Umum yang

¹ Prof. Dr. Thamrin Abdullah, S.Pd., M.M., Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M. *Bab 2 Bank & Lembaga Keuangann*. 2018, Penerbit Mitra Wacana Media. Hlm. 4

² “Lembaga Perbankan”. Lihat <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Ikhtisar-Perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.Aspx>. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025 Pukul 20.43.

memberikan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat luas, serta Bank Swasta Nasional yang dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri.³

Salah satu jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah merupakan Lembaga perbankan yang dimiliki pemerintah terutama pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.⁴ Bank Pembangunan Daerah (BPD) muncul sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah yang selama ini diabaikan oleh lembaga keuangan konvensional. Sejak didirikan pada tahun 1960an, BPD telah memainkan peran penting sebagai penggerak pembangunan, menjembatani kebutuhan pembiayaan antara pemerintah daerah dan pengusaha skala kecil dan menengah. Berdasarkan tujuan utamanya untuk menyediakan akses terhadap modal dan membangun pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, BPD berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia.⁵

Regulasi yang dibuat untuk menekan pengembangan Bank Pembangunan Daerah sendiri, diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1962. Undang-Undang tersebut mengatur Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (BPD).

³ "Jenis-Jenis Bank Yang Ada Di Indonesia Beserta Contohnya". Lihat <https://www.tempo.co/ekonomi/jenis-jenis-bank-yang-ada-di-indonesia-beserta-contohnya-133733>. Diakses Pada Tanggal 1 September 2025 Pukul 22.35.

⁴ Susi Setiawati. 2024 "Sejarah, Peran & Jumlah Bpd Di Ri: Apa Beda Dengan Bank Konvensional?". Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240610101445-128-545179/sejarah-peran-jumlah-bpd-di-ri-apa-beda-dengan-bank-konvensional>. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025 Pukul 21.02.

⁵ Gana Buana. 2025. "Apa Itu Bank Pembangunan Daerah? Sejarah, Peran, Jumlah, Dan Perbedaannya". Lihat <https://mediaindonesia.com/ekonomi/803524/apa-itu-bank-pembangunan-daerah-sejarah-peran-jumlah-dan-perbedaannya>. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025 Pukul 20.15.

Undang-undang ini ditetapkan dan mulai berlaku pada 16 Agustus 1962, Undang-Undang tersebut memberikan kerangka hukum bagi pendirian BPD, dengan sejumlah poin penting seperti, landasan hukum pendirian, fungsi utama bank yang memberi pembiayaan untuk proyek pembangunan daerah, baik yang digarap pemerintah daerah maupun swasta melalui APBD, dan menjadi saluran kredit bagi pemerintah daerah saat dibutuhkan.⁶

Indonesia mempunyai 38 provinsi sejak tahun 2022 yang semula 34, dengan menambahkan 4 provinsi baru yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.⁷ BPD di Indonesia berjumlah 27 Bank Pembangunan Daerah antara lain, Bank Aceh Syariah di Aceh, Bank Banten di Banten, Bank Bengkulu di Bengkulu, Bank DKI Jakarta, Bank Jambi, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BJB di Jawa Barat, Bank DIY, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng di Kalimantan Tengah, Bank Kaltimara di Kalimantan Utara, Bank Lampung, Bank Maluku, Bank NTB Syariah, Bank NTT, Bank Papua, Bank Riau, Bank Sulselbar di Sulawesi selatan dan Barat, Bank BSG di Sulawesi Utara dan Gorontalo, Bank Nagari di Sumatera Barat, Bank Sumsel Babel di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan Bank Sumut di Sumatera Utara.⁸

⁶ "Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah" Lihat <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/50698/Uu-No-13-Tahun-1962>. Diakses Pada Tanggal 1 September 2025. Pukul 22.44.

⁷ Ilham Fikriansyah. 2025. "Daftar 38 Provinsi Di Indonesia Lengkap Dengan Ibu Kota Provinsi". Lihat <https://www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-7777459/Daftar-38-Provinsi-Di-Indonesia-Lengkap-Dengan-Ibu-Kota-Provinsi>. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025 Pukul 21.23.

⁸ <https://www.Idntimes.Com/Business/Economy/Daftar-Contoh-Bank-Pembangunan-Daerah-Cek-Di-Daerahmu-00-Gshdq-1lyyl5>. Diakses Pada Tanggal 3 September 2025. Pukul 23.12.

Terdapat 27 Bank Pembangunan Daerah yang tersebar di seluruh nusantara, tidak semuanya beroperasi secara konvensional. Beberapa di antaranya sudah merambah ke ranah keuangan syariah baik melalui Unit Usaha Syariah (UUS) maupun perubahan penuh menjadi bank syariah murni (BUS). Misalnya, Bank NTB Syariah dan BRK Syariah (Riau-Kepri) adalah bentuk BPD yang sudah sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, sejumlah BPD lain telah memiliki UUS yang bertindak sebagai jembatan adaptasi terhadap peluang pertumbuhan ekonomi syariah di daerahnya.⁹

Bank Pembangunan Daerah lahir sebagai respon atas kebutuhan pemerintah daerah untuk memiliki lembaga keuangan yang mampu menggerakkan pembangunan, terutama pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Melalui regulasi tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah pusat Indonesia saat itu memberi ruang kepada daerah-daerah di Indonesia untuk mendirikan BPD sebagai penyalur kredit dan mengelola keuangan pembangunan daerah. Dalam perkembangan BPD yang ada di Indonesia, setiap BPD yang berdiri memiliki corak yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya daerah masing-masing. Salah satu yang menarik dari 27 Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia untuk dikaji adalah BPD Sumatera Barat, yang kemudiannya mengalami perubahan menjadi Bank Nagari. Perubahan ini tidak sekadar penyesuaian nama, melainkan juga menyangkut persoalan identitas, kedekatan dengan basis budaya nagari, badan hukum perbankan, serta respon terhadap tekanan regulasi nasional.

⁹ *Ibid*

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdiri secara resmi pada tanggal 12 Maret 1962 melalui akta Notaris Hasan Qalbi di Kota Padang, setelah diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat setempat demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 April 1962, Surat Keputusan dari Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangann Republik Indonesia (No. BUM/9-44/II) mengesahkan izin usaha PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang menandai dimulainya operasional bank ini dengan berkedudukan di Padang.¹⁰

Bank Nagari pada awal pendiriannya menempatkan Kantor Pusat di Padang, tepatnya di kawasan Batang Arau, yang mulai beroperasi resmi pada 17 Agustus 1962. Kehadiran kantor pusat ini menjadi tonggak awal bagi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangann daerah.¹¹ Perkembangan jaringan usaha kemudiann ditandai dengan dibukanya kantor cabang pertama di Payakumbuh pada tanggal 25 September tahun 1965 melalui izin usaha Gubernur Bank Indonesia Nomor Kep 19/UBS/65.¹²

Bank Nagari dalam perkembangannya tidak hanya berfokus pada penguatan jaringan kantor di Sumatera Barat, tetapi juga melakukan langkah strategis dalam bidang keuangann. Bank ini tercatat sebagai Bank Pembangunan Daerah pertama yang menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp15 miliar sebagai upaya

¹⁰ Sejarah Singkat Bank Nagari, Dalam *Sejarah Singkat Bank Nagari*, <https://Text-Id.123dok.Com/Document/Dy4xv650z-Sejarah-Singkat-Bank-Nagari.Html>.

¹¹ Proses Bank Sebagai Perantara Antara Orang Yang Punya Uang Dan Orang Yang Butuh Uang

¹² Sejarah Bank Nagari. Lihat <https://Www.Banknagari.Co.Id/Profile?Page=G1nugtldjsww%2faha5ugaq%3d%3d>. Diakses Pada Tanggal 3 September 2025. Pukul 12.41.

meningkatkan permodalan usaha. Selanjutnya, pada tahun 1991, Bank Nagari kembali mencatat sejarah dengan menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama yang memperoleh izin sebagai Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/60/KEP/DIR tanggal 17 Januari 1991. Berjalannya dengan upaya membangun identitas yang lebih kuat, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1996 ditetapkan penggunaan nama populer “Bank Nagari” dengan tujuan mempertegas citra merek serta mencerminkan kedekatannya dengan sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Pada tahun yang sama, Bank Nagari juga menjadi pelopor di antara Bank Pembangunan Daerah dengan membuka kantor cabang di luar wilayah, yaitu di Jakarta yang kemudiann diikuti dengan pembukaan cabang di Pekanbaru.¹³

Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah di Sumatera Barat, lahir dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962, memang ditugaskan mendorong kemajuan ekonomi sekaligus kesejahteraan sosial warga setempat. Tugas sosialnya ini terlihat jelas melalui program *Corporate Social Responsibility* atau CSR juga dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Melalui CSR, Bank Nagari berkomitmen bikin perubahan nyata dan jangka panjang buat masyarakat, alam sekitar, karyawan, serta nasabahnya.¹⁴ Pada dasarnya, CSR itu cara perusahaan menyatukan perhatian sosial, lingkungan, dan etika usaha ke dalam seluruh kegiatan bisnisnya. Tidak hanya mengejar untung semata, tetapi menyeimbangkan

¹³ “Sejarah Bank Nagari”. Lihat <https://www.banknagari.co.id/profile?Page=G1lnugtdjsww%2faha5ugaq%3d%3d>. Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2025. Pada Pukul 13.04.

¹⁴ Lihat <https://banknagari.co.id/csr?Page=A8w6mqm3lnjkrpebaa4grq%3d%3d>. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2026. Pukul 03.25

tiga pilar yaitu: keuntungan (*profit*), kesejahteraan manusia (*people*), dan kelestarian bumi (*planet*).¹⁵ Bank Nagari sendiri punya visi CSR "Membangun Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas" untuk bantu pemeratan ekonomi di Sumatera Barat. Program Bank Nagari menysasar kepada bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, keagamaan, pemberdayaan warga, dan tanggap bencana.¹⁶

Bank Nagari memasuki tahun 2007 mengubah badan hukum yang semula berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), perubahan ini secara resmi dikukuhkan melalui Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Februari tahun 2007 di hadapan Notaris H. Hendri Final, SH, dan mendapatkan legalitas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁷ Seiring dengan penguatan status hukum tersebut, Bank Nagari pada tahun 2007 semakin mempertegas jati dirinya sebagai lembaga yang berakar pada masyarakat Sumatera Barat melalui penguatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Implementasi CSR di Bank Nagari mengadopsi konsep *triple bottom lines*, yakni keseimbangan antara perolehan laba (*profit*), kepedulian terhadap masyarakat (*people*), dan pelestarian lingkungan (*planet*). Konsep ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, di

¹⁵ Lihat https://Bidangusaha.Co.Id/Pengertian-Corporate-Social-Responsibility/?Gad_Source=1&Gad_Campaignid=21167839328&Gbraid=0aaaaa9ijiuotafeksrzb5ercr_T07zf9n&Gclid=Cj0kcqiakpzlbhd4arisagfah8if8cmo0nino_Gx_Ml483ipitankcjqqs7iylhgncck3gmdx0bp-Q4eiaavvmealw_Wcb. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2026. Pukul 03.28

¹⁶ Lihat <https://Banknagari.Co.Id/Csr?Page=A8w6mqm3lnjkrpebaa4grq%3d%3d>. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2026. Pukul 03.25

¹⁷ Lihat : <https://Www.Banknagari.Co.Id/Profile?Page=G1nugtldjsww%2faha5ugaq%3d%3d>

mana keberhasilan finansial yang diraih dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata bagi pembangunan daerah.¹⁸

Salah satu alasan pemilihan Bank Nagari sebagai objek penelitian adalah karena lembaga tersebut memiliki akar historis dan peran strategis dalam pembangunan daerah Sumatera Barat. Sejak berdiri pada tanggal 12 Maret 1962, dengan perubahan nama dan identitas Bank Nagari membuktikan bahwa yang semula Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kini bank tersebut tidak hanya sekedar bank yang membantu pembangunan, dan perekonomian, tetapi menjadi simbol kedaerahan bank milik pemerintah provinsi Sumatera Barat yang hadir untuk menjawab kebutuhan lokal secara lebih cepat dan responsif dibanding bank-bank pembangunan daerah lainnya. Melalui perluasan jaringan hingga tingkat nagari dan integrasi layanan syari'ah (UUS sejak 2006), lembaga ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi kelembagaan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi Minangkabau.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dan mengetahui bagaimana perubahan bank pembangunan daerah Sumatera Barat menjadi Bank Nagari secara historis, dan memahami kontribusi Bank Nagari dalam membangun ekonomi.

¹⁸ Laporan Tahunan 2007 Bank Nagari.

¹⁹ Chaniago, Dalam *Bank Nagari Sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat*, Menyebut Bahwa 60–80% Kredit Bank Nagari Disalurkan Ke Umkm Dan Sektor Usaha Kecil Pedesaan, Sejalan Dengan Program Pengembangan Ekonomi Nagari.

1.2 Rumusan Masalah

Batasan spasial penelitian ini adalah Kota Padang, kota Padang dipilih sebagai daerah penelitian, karena Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pertama kali muncul di Kota Padang, dan juga Kota Padang sebagai pusat perekonomian Provinsi Sumatera Barat.

Batasan temporal dari penelitian ini tahun 1962 hingga 2007. Pada tahun 1962 pertama kali dibentuknya peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah, yang ditujukan untuk membantu perekonomian setiap daerah yang tidak terjangkau oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2007 diambil sebagai Batasan akhir karena peraturan *Corporate Social Responsibility* atau CSR itu juga dibentuk, dan pada saat itu nama BPD Sumatera Barat sudah berganti identitas menjadi Bank Nagari, juga Bank Nagari menjalankan sistem CSR berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan beroperasi di bidang sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Fokus penelitian adalah sejarah proses dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Nagari.

Untuk lebih memfokuskan permasalahan maka diajukan beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat?

2. Mengapa terjadi perubahan nama BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari?
3. Apa peran Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tentang sejarah bagaimana proses perubahan dan identitas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Nagari, sebagai bank citra Sumatera Barat yang beroperasi di pusat Kota Padang. Serta lebih mengetahui apa peranan penting yang dibawa oleh Bank Nagari untuk perekonomian daerah Sumatera Barat. Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan latar belakang berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
2. Menganalisis bagaimana pergantian nama BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari
3. Menjelaskan peran Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan berupa wawasan pengetahuan dan informasi secara umum terkait sejarah dari proses perubahan nama dan identitas BPD Sumatera Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah yang ingin mengkaji mengenai sejarah dan perkembangan Bank Nagari sebagai institusi lokal

di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan sejarah yang telah ada sebelumnya terkait sejarah perbankan, khususnya pendirian Bank Nagari sebagai institusi keuangan lokal di Kota Padang terutama bagi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan studi pustaka terdapat sejumlah referensi yang relevan dan dapat dijadikan sebagai landasan teoretis serta bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini. Sumber-sumber ini membantu menjelaskan konteks historis, fungsi perbankan, sosial, budaya, dan kelembagaan.

Perkembangan sistem keuangan dan perbankan di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan sejarah panjang ekonomi modern sejak zaman penjajahan Belanda hingga masa setelah kemerdekaan. Topik historis ini dibahas oleh Ayu Yuli Andriani dan Masrul dalam buku mereka yang berjudul Pengantar Perbankan. Melalui literatur tersebut, kedua penulis memaparkan bahwa modal awal perbankan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1828 saat Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan De Javasche Bank untuk mengatur peredaran uang.²⁰

Transformasi status hukum dan reposisi kelembagaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam sistem perbankan nasional menjadi fokus utama yang

²⁰ Ayu Yuli Andriani Dan Masrul, *Pengantar Perbankan* (Padang: Lppm Universitas Ekasakti, 2023), Hlm. 1–5.

melatarbelakangi pembahasan ini. Isu yuridis²¹tersebut dikaji secara mendalam oleh Gunawan Widjaja dalam literatur ilmiahnya yang mengulas kedudukan hukum BPD. Berdasarkan kajian tersebut, tercatat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 awalnya menempatkan BPD sebagai lembaga keuangan khusus yang disokong oleh modal pemerintah daerah guna mendorong pembangunan regional. Namun, arah kebijakan berubah total saat pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Regulasi baru ini menghapus status khusus BPD dan mewajibkannya berubah menjadi bank umum biasa dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah.²²

Penelitian mengenai perbankan daerah di Indonesia selama ini masih didominasi oleh kajian aspek ekonomi, kinerja keuangan, dan regulasi hukum, sehingga sering kali mengabaikan dimensi historis serta identitas kelembagaannya. Sementara itu, penelitian BPD di tingkat nasional lebih banyak menekankan persoalan status hukum, namun belum menyentuh bagaimana dinamika sosial, budaya, dan politik lokal ikut membentuk identitas perbankan daerah tersebut. Akibatnya, terjadi kekosongan ilmiah dalam mengkaji perkembangan BPD Sumatera Barat meliputi perubahan nama dan identitas BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari sepanjang tahun 1962 hingga 2007.

²¹ Yuridis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau berdasarkan ketentuan hukum

²² Thamrin Abdullah Dan Sintha Wahjusaputri, *Bank Dan Lembaga Keuangann* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2021.

1.5 Kerangka Analisis

Konsep pembaruan citra perusahaan secara mendasar berpusat pada upaya membangun kembali identitas dan memposisikan ulang posisi merek di mata publik agar eksistensi organisasi tetap relevan. Kerangka pemikiran mengenai *corporate rebranding* ini dibahas oleh Muzellec dan Lambkin (2006) dalam artikel ilmiah mereka yang berjudul *Corporate rebranding: Destroying, transferring, or creating brand equity?*. Berdasarkan teori tersebut, proses perubahan ini tidak hanya sekadar mengganti nama, tetapi merupakan langkah terencana yang menggabungkan perbaikan fasilitas fisik dengan strategi pembentukan citra baru. Tujuannya adalah agar persepsi masyarakat bisa sejalan dengan arah dan orientasi baru yang ingin dicapai oleh lembaga atau perusahaan tersebut.²³ Teori ini relevan terhadap penelitian ini karena penelitian ini memfokuskan perubahan nama BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari, yang dalam proses perubahan nama tersebut Bank Nagari memperbarui nama panggilan dan terakhir logo agar tetap relevan dengan citra masyarakat Sumatera Barat.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian sejarah terdapat empat tahap penelitian, yaitu heuristik, kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Penelitian sejarah merupakan mempelajari peristiwa dan kejadian-kejadian pada masa lampau manusia.²⁴ Menyesuaikan dengan metode penelitian sejarah, penelitian ini memakai metode penelitian Sejarah, yaitu tahap heuristik, tahap heuristik merupakan tahap pengumpulan data dan sumber. Dalam

²³ Laurent Muzzelec and Mary Lambkin, “*Corporate rebranding: Destroying, transferring, or creating brand equity?*”, *European Journal of Marketing. University College Dublin, Dublin, Ireland*.

²⁴ Metode Sejarah Karya Prof.Dr. Nina Herlina, M.S, 2020. Hlm. 1.

penelitian sejarah heuristik penting dalam tahapan yang penting dalam awal melakukan penelitian.

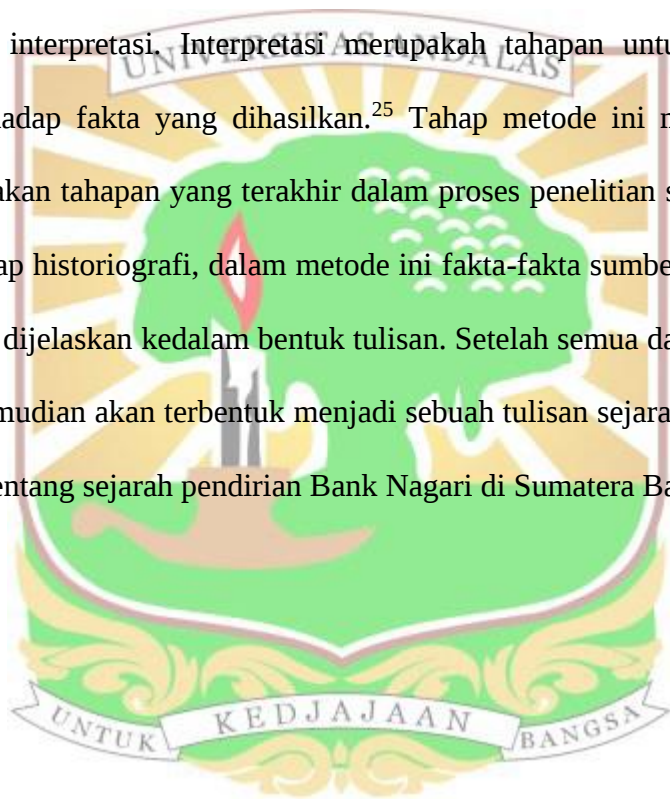
Langkah awal yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk penelitian sejarah, sumber tersendiri mempunyai dua bagian yaitu sumber primer dan sumber sekunder yang keduanya perlu dikumpulkan dalam langkah awal penelitian. Dalam sejarah sumber yang penting dalam pengumpulan sumber yaitu berupa foto, peta, dokumen, arsip-arsip yang mendukung penelitian.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Arsip resmi pendirian Bank Nagari, wawancara dengan pengurus Bank Nagari, dan juga Tempat penelitian yang akan dilakukan termasuk juga kedalam sumber primer yang berada di kantor Pusat, PT. Bank Nagari Jl. Pemuda No.21, Padang, Sumatera Barat. Sumber sekunder dalam penelitian ini yang diperlukan meliputi jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Sejarah proses perubahan nama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Nagari. Sumber sekunder diperoleh dari tinjauan pustakan yang berkaitan tentang perekonomian Indonesia, arsip Undang-Undang dalam mengatur pendirian Bank Pembangunan Daerah, Sejarah pendirian Bank Nagari, dan proses perubahan nama BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari.

Metode kedua dalam metode penelitian sejarah yaitu kritik terhadap sumber. Kritik sumber sejarah yang telah didapat bertujuan untuk mencari kebenaran sumber. Proses dalam kritik sumber ini dilakukan penelitian sejarah untuk mendapatkan fakta dan kebenaran sumber-sumber yang telah didapat sehingga mendapat sumber-sumber yang asli dan sesuai fakta.

Kritik sumber juga mempunyai dua syarat yaitu kritik sumber eksternal dan kritik sumber internal. Kritik sumber eksternal yaitu pemeriksaan asal-usul dari sumber yang didapat dan memastikan apakah pada suatu waktu sumber tersebut sudah diubah oleh orang terjuga atau tidak. Kritik internal sendiri dilakukan untuk menguji keaslian sumber yang didapat.

Dalam metode penelitian sejarah yang ketiga setelah melakukan kritik sumber yang didapat yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan untuk menafsirkan informasi terhadap fakta yang dihasilkan.²⁵ Tahap metode ini menjadi penting karena merupakan tahapan yang terakhir dalam proses penelitian sejarah sebelum memasuki tahap historiografi, dalam metode ini fakta-fakta sumber yang sudah di tafsirkan akan dijelaskan kedalam bentuk tulisan. Setelah semua data sumber telah ditafsirkan kemudian akan terbentuk menjadi sebuah tulisan sejarah dan terbentuk historiografi tentang sejarah pendirian Bank Nagari di Sumatera Barat.



²⁵ Metode Sejarah Karya Prof.Dr. Nina Herlina, M.S, 2020. Hlm. 30